



Anggaran Infrastruktur Minim Pembangunan Tabanan Terancam Stagnan

Tabanan (Bali Post) -

Minimnya anggaran infrastruktur di Kabupaten Tabanan terancam stagnan. Hal ini makin mengkhawatirkan mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa ditingkatkan secara maksimal. Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) 2016, potensi PAD dari tahun 2015 hanya meningkat sekitar Rp 7 miliar. Sementara di sisi lain APBD Tabanan tahun 2016 akan dibebani lagi alokasi untuk dana desa sesuai amanat UU Desa.

Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar I Ketut 'Boping' Suryadi mengakui, pembangunan di tahun 2016 tidak jauh berbeda dari tahun 2015. Ini dikarenakan, pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2015 jumlah PAD hanya Rp 243,78 miliar lebih. Sedangkan tahun 2016 potensi penambahannya hanya sekitar Rp 7 miliar menjadi sekitar Rp 250 miliar lebih.

Melihat kondisi tersebut, politisi PDI-P asal Bajera ini mengaku sulit bagi daerah

lambung Beras Bali ini untuk bisa melakukan pembangunan karena minimnya dana. "Kami harap anggaran dari pusat bisa lebih banyak untuk pembangunan baik berupa DAK maupun DAU," katanya, belum lama ini.

Ia mengatakan sampai saat ini angka DAK maupun DAU termasuk BKK baik pusat maupun provinsi belum diketahui. "Presiden baru menyampaikan nota keuangan APBN tahun 2016 ke DPR RI 16 Agustus mendatang. Sementara pembahasan kami hanya pada potensi peningkatan pendapatan asli

daerah saja, belum bisa bicara yang lain," ungkapnya.

Jika pemerintah pusat telah menyampaikan nota keuangan barulah nantinya di daerah memiliki gambaran DAU, DAK maupun BKK yang akan diterima. "Dari sana baru dilakukan penyesuaian anggaran dalam pembahasan RAPBD 2016," ucapnya.

Saat ini, DPRD Tabanan berkonsentrasi membahas sektor pendapatan daerah. Bahkan seluruh anggota Banggar juga telah turun ke objek wisata yang menjadi penghasil PAD bagi Tabanan. (kmb28)

Edisi : Kamis, 9 Juli 2015

Hal : 16



Sambungan ---

membangun Badung, saya ingin pastikan berjalan lancar sesuai rencana," jelasnya.

Dari sekian proyek yang di-genjot di wilayah Badung Utara, sebagian besar orientasinya untuk pelayanan publik. Misalnya pembangunan gedung paviliun Mangusada RSUD Badung, kantor Camat Mengwi, Puskesmas I Abiansemal, pembangunan RKB, ruang kepala sekolah SD No. 2 Blahkiuh, pembangunan kantor Camat Petang, dan pembangunan gedung Klinik Ibu dan Anak Puskesmas Petang I, serta pembangunan saluran irigasi di Subak Tangkub Mengwi. Hanya ada satu proyek penambahan destinasi wisata di Taman Mumbul Sangeh dan gudang aset, terkait tata kelola pemerintahan di Puspem. "Khusus objek Taman Mumbul, kami harapkan tahun depan sudah bisa jadi tambahan destinasi wisata baru di Badung Utara. Sedangkan gedung arsip, kami proyeksikan bisa menjadi tempat khusus untuk mengamankan aset-aset pemerintah yang akan dilelang. Sehingga tidak ada kesan aset yang akan dilelang ditelantarkan. Gudang aset ini kami siapkan lengkap dengan sarana-prasarana dan tempat lelangnya," papar Gde Agung.

Terkait RSUD Badung, Panglingsir Puri Ageng Mengwi ini menjelaskan, dengan rampungnya gedung paviliun otomatis ada tempat khusus bagi pelayanan *krama* Badung yang berduit. Pasalnya, gedung baru ini menyajikan kamar VIP, VVIP dan super VIP. Servis bagi masyarakat mampu ini juga luar biasa. Mereka tidak perlu bolak-balik lagi ke gedung sebelah, ada peralatan canggih, UGD dan pendukung lainnya di situ.

Secara khusus, lanjut Gde Agung, ruang paviliun ini juga akan membantu masyarakat yang tidak mampu. Pasalnya, hasil dari yang mampu ini akan digunakan untuk mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. "Paviliun ini juga masuk pelayanan. Cuma, dialokasikan untuk mereka-mereka yang mampu. Dan, hasil dari yang mampu ini akan dipakai untuk mensubsidi yang tidak mampu," ucap Gde Agung sembari menyebutkan, dalam waktu dekat ranperda tentang kelembagaan dan penamaan RSUD Badung akan segera diajukan ke DPRD Badung untuk dimintakan persetujuan. (ad646)

Edisi	: Kamis, 9 Juli 2015
Hal	: 2



Bangun Pelayanan Publik hingga Tingkat Kecamatan

Gde Agung Pastikan Sebelum Purnatugas

Proyek APBD Berjalan Lancar

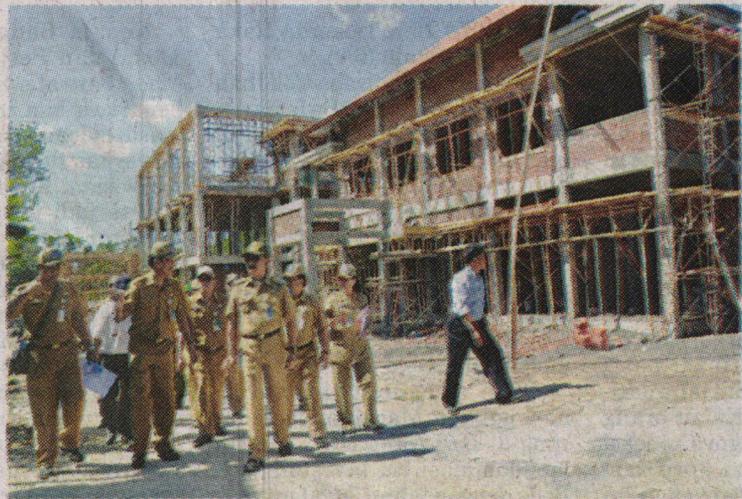
PEMKAB Badung menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama tahun 2015. Terbukti, berbagai sarana-prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, digenot di akhir masa jabatan Bupati Badung A.A. Gde Agung. Pelayanan publik yang dibangun, tak hanya yang ada di pusat pemerintahan (Puspem) Badung, namun juga tersebar hingga ke masing-masing kecamatan. Bahkan, semua kantor camat di Badung sekarang dibangun lengkap dengan gedung pelayanan.

Bupati Badung A.A. Gde Agung saat meninjau proyek fisik APBD Badung Tahun 2015, Selasa (7/7) lalu, menyatakan tahun ini sebagai tahun pelayanan. Wujud konkretnya adalah dengan melengkapi seluruh gedung pemerintah dengan sarana dan prasarana pelayanan publik. Misalnya di tingkat kecamatan, dengan membangun kantor camat lengkap dengan gedung pelayanan untuk Paten, pengurusan KTP dan kartu keluarga. Gedung-gedung pelayanan ini bahkan sengaja dibangun terpisah dengan bangunan kantor camat agar bidang pelayanan bisa

lebih fokus. "Orientasi proyek kita, khusus di Badung Utara tahun ini adalah untuk pelayanan publik," tegas Gde Agung.

Untuk memastikan proyek pemerintah berjalan lancar dan sesuai rencana, Gde Agung bersama pimpinan SKPD Badung, Selasa lalu meninjau langsung proyek-proyek yang ada di Badung Utara. Sedikitnya ada sembilan proyek fisik yang dipantau satu per satu oleh Gde

Agung. Menurut Gde Agung, pemantauan ini penting untuk memonitor perkembangan proyek, sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan rekanan di lapangan. Ia ingin memastikan, sebelum purnatugas pada 5 Agustus nanti, semua proyek yang memakai uang rakyat Badung berjalan dengan baik. "Ini adalah pemantauan di akhir masa jabatan saya. Niat saya, semangat saya untuk



MENINJAU - Bupati Badung A.A. Gde Agung meninjau proyek fisik APBD Badung Tahun 2015, Selasa (7/7) lalu.



Kasus Korupsi Proyek IHDN Denpasar Berlanjut

PPK Pengadaan Barang Dijebloskan ke Lapas Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -

Kasus korupsi proyek pengadaan 14 item barang di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, ternyata berlanjut. Setelah mengadili Prof. Dr. I Made Titib, Dr. Praptini, Ni Putu Indra Maritin, I Wayan Sudiasa dan I Nyoman Sueca, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kini menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Putu Sukarsana sebagai tersangka. Bahkan, Rabu (8/7) kemarin tersangka langsung dijebloskan ke Lapas Kerobokan.

Hal itu dibenarkan Aspidsus Kejati Bali Erna Normawati Wdodo Putri, Rabu kemarin. Dikatakannya, penahanan Su-

karsana merupakan pengembangan kasus dari fakta yang diperoleh dalam sidang sebelumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam proyek ini, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 4,8 miliar. Dengan ditahannya PPK itu, artinya dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan tahap II.

Menurut Aspidsus, berkas perkara kasus ini akan segera dilakukan pra-penuntutan (pratut). Apabila hasil pratutnya sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penelitinya, maka akan segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Denpasar.

Disinggung soal kasus dana punia yang menetapkan Prof.

Made Titib dan Praptini sebagai tersangka, Aspidsus Erna mengatakan, kasus itu masih dalam proses pemberkasan. Jika proses tersebut sudah selesai dan jika berkas sudah dinyatakan lengkap, maka akan segera dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Sebelumnya, lima terpidana diajukan ke persidangan dalam kasus korupsi proyek di IHDN Denpasar. Mereka adalah mantan Rektor IHDN Prof. Dr. I Made Titib, mantan PR II IHDN Dr. Praptini, rekanan Ni Putu Indra Maritin dan I Wayan Sudiasa serta I Nyoman Sueca selaku Kasubag Perencanaan IHDN. (kmb37)

Edisi : Kamis, 9 Juli 2015

Hal : 3



Kejati Bidik Tiga Dugaan Korupsi di Biro Kesra Pemprov

Denpasar (Bali post) -

Disorot atas sejumlah perkara mentok alias bergaung sesaat, seperti kasus jembatan *shortcut* dan reklame Denpasar yang dihentikan sementara karena belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH), diam-diam Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali membidik sejumlah kasus di Pemprov Bali. Setidaknya, ada tiga elemen dugaan korupsi yang sedang dilakukan pengumpulan data (puldata). Semuanya ada di Biro Kesra Pemprov Bali.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan yang dimintai konfirmasi, Rabu (8/7) kemarin, membenarkan pihak kejaksaan sedang membidik tiga perkara dugaan penyimpangan di Biro Kesra Pemprov Bali. "Ya, memang benar ada laporan seperti itu. Dan, tim dari intelijen sudah melakukan puldata," katanya, kemarin.

Bahkan, lanjutnya, untuk

menyikapi dugaan penyimpangan itu, sudah diterbitkan surat perintah tugas (*sprintug*) guna mencari data di Biro Kesra Pemprov Bali. Tiga elemen dugaan penyimpangan dimaksud yang telah dilakukan puldata adalah tentang Peningkatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana, peningkatan upacara *dewa yadnya* dan penerangan, bimbingan dan kerukunan hidup beragama. Pihak kejaksaan menyebutkan, yang sedang dibidik itu semuanya di Biro Kesra tahun 2014.

Disinggung soal pemeriksaan saksi atau berkas yang sudah disita, Ashari Kurniawan mengaku dari bagian intelijen sudah sempat datang ke Biro Kesra. Sejumlah pegawai di sana sudah dimintai keterangan guna mengumpulkan bahan informasi. "Beberapa pihak sudah dimintai keterangan. Karena ini baru puldata, maka pengalihan informasi dilakukan

dengan pola wawancara," sambung pria asal Yogyakarta ini.

Ditanya nama-nama orang yang dimintai keterangan, Ashari belum mau membeberkannya. "Soal nama-nama, jangan dulu. Yang jelas, kita sudah minta keterangan secara lisan. Kita lakukan wawancara," sambung Ashari.

Informasi lainnya, terkuaknya kasus tersebut bukan dari temuan BPKP. Melainkan, berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan di Biro Kesra Pemprov Bali.

Soal potensi kerugian negara, pihak kejaksaan belum berani memberikan keterangan. "Yang jelas ini menyerap anggaran hingga miliaran rupiah," sebut sumber kejaksaan.

Ashari yang dimintai konfirmasi hal ini, belum mau memberikan komentar sejauh itu. "Kan baru puldata. Soal nominal, nanti dulu," katanya lagi. (kmb37)



Mabes Polri Limpahkan Kasus "Mark-Up" BP3TKI Bali

Kerugian Negara Diduga Capai Rp 2 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik dari Tim Tipikor Mabes Polri di bawah komando AKBP Aneke Wicano, Rabu (8/7) kemarin melimpahkan berkas dan tersangka dugaan korupsi atau *mark-up* pengadaan tanah di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali. Dua dari empat tersangka ikut digiring polisi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Mereka adalah tersangka Wayan Pageh dan Prio Adi Santoso.

AKBP Aneke yang ditemui usai pelimpahan mengatakan, memang dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2 miliar lebih itu menetapkan empat orang sebagai tersangka. "Namun yang kami limpahkan untuk dua tersangka. Dua tersangka lagi sedang da-

lam proses dan dilimpahkan (ditangani) ke Polda Bali," jelas Polwan ini.

Dijelaskannya, perkara ini adalah *mark-up* pengadaan tanah. Tersangka Wayan Pageh yang merupakan Kepala Badan di BP3TKI Bali dalam proyek pengadaan ini berkedudukan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). "Sedangkan Pak Prio sebagai PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen," sebutnya. Prio sendiri di BP3TKI Bali menjabat sebagai Kabag TU. Sedangkan tersangka dua orang yang dilimpahkan penyidikannya ke Polda Bali adalah pemilik lahan dan ketua panitia pengadaan tahun 2013. Paramartha adalah pemilik tanah dan Trusdi merupakan ketua pengadaan tanah. Modus yang dilakukan adalah *mark-up* harga, yakni dari total harga Rp 5 miliar menjadi sekitar Rp 7 mil-

iar. "Luas tanahnya 400 meter," sebut polisi.

Kasipidsus Kejari Denpasar Wayan Sutarjana membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tahap II dari Mabes Polri terkait kasus BP3TKI Bali. Kedua tersangka akan dititipkan di Lapas Kerobokan, yang sebelumnya ditahan di Mabes Polri.

Pantauan di kejaksaan, Wayan Pageh tampak bingung atas kejadian ini. Apalagi saat wartawan datang untuk mengambil gambarnya. Sebelum kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan, Februari 2015 lalu, Mabes Polri sempat melakukan pengeledahan di kantor BP3TKI Bali di Jalan Danau Tempe, Denpasar. Pihak penyidik mencari dokumen, karena ada dugaan pengelembungan harga sekitar Rp 2 miliar lebih. (kmb37)

Edisi : Kamis, 9 Juli 2015

Hal : 3



Pembuatan Beton di Eks Galian C Masyarakat Pertanyakan Komitmen Bupati

Semarapura (Bali Post) -

Keberadaan proyek pembuatan beton di eks galian C Gunaksa meresahkan masyarakat sekitar. Proyek yang dimiliki perusahaan Sinar Bali tersebut beroperasi diam-diam tanpa adanya sosialisasi. Masyarakat pun mempertanyakan keberadaan proyek yang sudah beroperasi seminggu lalu itu. Mengingat keberadaan pembuatan beton di lahan eks galian C tidak ditindak tegas oleh Pemkab Klungkung. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta pun diminta tidak tebang pilih dalam menegakan aturan.

Kadus Banjar Patus Wayan Sudiarna mengakui telah menerima laporan dari masyarakat terkait hal ini. Menurutnya, aktivitas pembuatan beton yang masuk wilayah Banjar Patus, Desa Gunaksa tersebut sudah dilaksanakan sejak seminggu lalu. Pihaknya menyangkan aktivitas tersebut dilakukan tanpa adanya sosial-

isasi. "Masyarakat mengira akan ada pembuatan Estuari Dam. Tapi ternyata pembuatan beton. Tidak ada sosialisasi ke masyarakat," ujarnya, Rabu (8/7) kemarin.

Proyek pembuatan beton yang ada di Banjar Patus tersebut sampai saat ini tidak ada penindakan dari pihak berwajib dalam hal ini Sat-

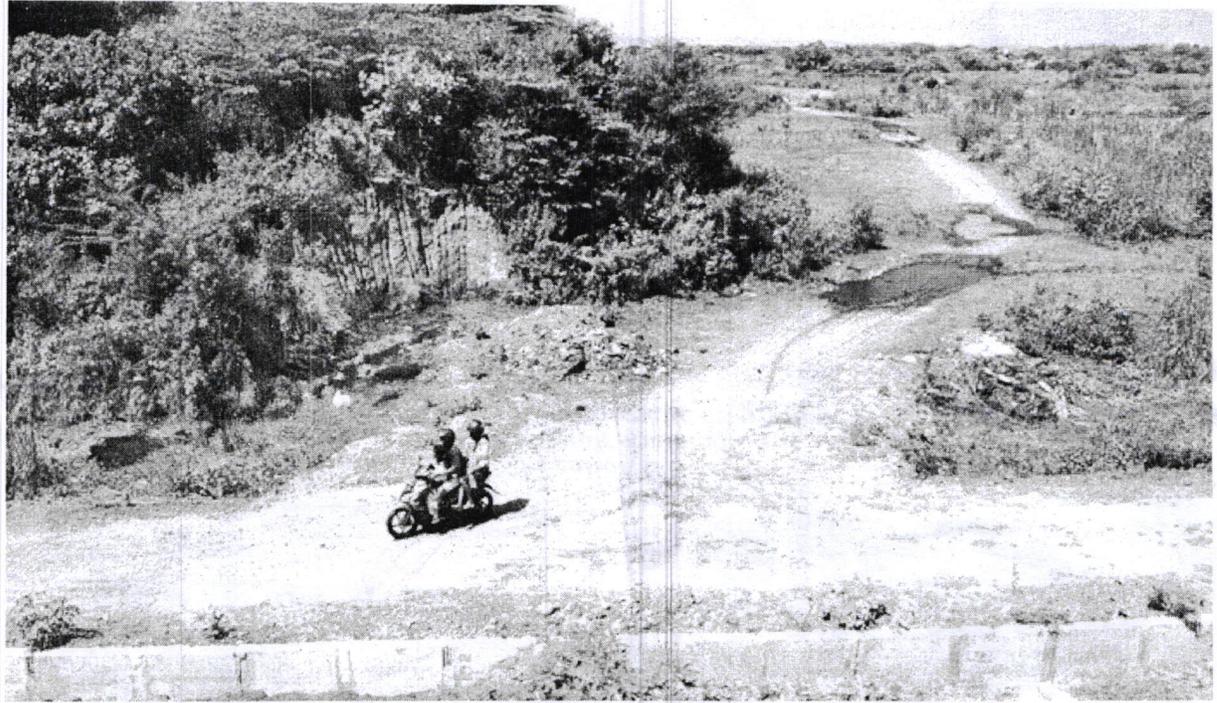
pol PP Pemkab Klungkung. Mengingat sebelumnya Bupati Klungkung membuat surat edaran untuk menghentikan segala aktivitas yang ada di eks galian C. Tentu saja, akibat surat edaran tersebut masyarakat tidak berani lagi melakukan kegiatan di bekas lokasi penambangan pasir. Sayangnya, perusahaan be-

Edisi : Kamis, 9 Juli 2015

Hal : 3



Sambungan - - -



Bali Post/mb

ETON - Proyek pembuatan beton di eks galian C Gunaksa meresahkan masyarakat sekitar. Proyek yang masuk wilayah Banjar Patus, Desa Gunaksa tersebut sudah dilaksanakan sejak seminggu lalu itu beroperasi diam-diam tanpa ada sosialisasi. Masyarakat mendesak Bupati Klungkung menegakkan aturan sesuai edaran yang diterbitkan untuk menghentikan semua aktivitas di galian C Klungkung.

sar bisa beroperasi dengan leluasa. "Ada mobil mix yang beroperasi mengangkut material ke tempat itu sudah seminggu ini," bebarnya.

Pihaknya pun meminta aturan yang sudah ditetapkan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta agar ditindaklanjuti dengan tegas. Jangan sampai aturan yang sudah dibuat tersebut hanya tegas untuk masyarakat saja dan ditoleransi kepada pengusaha besar. Pihaknya meminta kepada SKPD terkait agar tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan. "Seharusnya apa yang menjadi keputusan ditegakan sehingga tidak ada kesan

tebang pilih," bebarnya.

Terkait dengan aktivitas pembuatan beton di eks galian C tersebut, saat dikonfirmasi Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal itu. Meski begitu, Bupati Suwirta akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP Klungkung dan SKPD terkait untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu. "Satpol PP yang memiliki tanggung jawab untuk menindaknya. Saya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait termasuk mengonfirmasi langsung Sinar Bali," jelasnya. (dwa)



Soal Bagi-bagi UP PBB

Kejari Didesak

Segera

Tetapkan

Tersangka

Bangli (Bali Post) -

Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bangli Peduli Pilkada Bersih (FMB-PPB), Rabu (8/7) kemarin mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli. Kedatangan FMB-PPB tersebut guna mendesak Kejari untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan upah pungut pajak bumi dan bangunan (UP-PBB) yang tengah ditangani Jaksa saat ini.

Bahkan FMB-PPB juga mendesak Kejari untuk segera menuntaskan kasus tersebut sebelum penetapan pasangan calon Bupati Bangli oleh KPU pada 27 Juli mendatang. Ketua FMB-PPB Nyoman Alit Adiana, S.H. dalam pernyataannya mengatakan sejauh ini yang diperiksa oleh Kejari baru sebatas pegawai dari Dispenda dan beberapa pejabat saja.

Padahal sesuai Keputusan Bupati Bangli No.977/53/2011, ada sejumlah pejabat yang menerima upah pungut tersebut. Di antaranya Bupati Bangli sebesar 4 persen, Wakil Bupati 3,5 persen, Sekda 3 persen, Kepala Dispenda 3 persen serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar 1,85 persen. Selain itu staf teknis yang menerima upah pungut dengan bagian

antara 4 hingga 34,29 persen.

Upah pungut itu sempat diterima sejumlah pejabat sebelum akhirnya Bupati Bangli mengeluarkan keputusan No. 937/264/2012 yang isinya tentang pencabutan keputusan bupati No. 937/153/2011, tentang alokasi pembagian biaya pemungutan PBB pertambahan kepada pejabat dan staf teknis operasional Dispenda/

Pasedahan Agung Bangli.

Karena disinyalir terjadi penyimpangan pengelolaan upah pungut PBB itu, FMB-PPB pun mendesak Kejari untuk segera memeriksa pejabat terkait yang menerima bagian upah pungut tersebut. FMB-PPB juga meminta Kejari untuk memproses kasus ini hingga tuntas sampai ke akar-akarnya serta sesegera mungkin menetapkan tersangkanya. "Kami juga meminta Kejari menuntaskan kasus ini sebelum penetapan pasangan calon Bupati Bangli oleh KPU pada tanggal 27 Juli 2015. Sebab kami tidak ingin ada pasangan calon Bu-

pati yang terindikasi dalam kasus korupsi," terangnya.

Alit mengatakan sebenarnya kasus serupa seperti ini sudah sempat terjadi di Buleleng yang menyebabkan mantan bupati Buleleng Gede Bagiada serta pejabat terkait lainnya mendekam di penjara. Dengan contoh itu menurutnya tidak menutup kemungkinan Bupati Bangli juga bisa ditetapkan menjadi tersangka sebagaimana halnya mantan Bupati Buleleng Bagiada. "Kami sangat mendukung kinerja kejaksaan secara independen, tanpa tekanan dari penguasa di daerah Bangli saat ini," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Kamis, 9 Juli 2015

Hal : 10